

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Dengan *title* negara berkembang ini ada banyak hal yang bisa dibahas lebih dalam dan yang perlu diketahui adalah pada dasarnya masih banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang khususnya Indonesia ini, seperti tingkat pengangguran yang tinggi yang diikuti juga dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, inflasi yang tinggi, pendapatan perkapita rendah, keterbatasan terhadap akses fasilitas publik dan sosial, disparitas pendapatan masyarakat dan lain sebagainya.

Salah satu indikator untuk mengukur pembangunan ekonomi suatu negara yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi, yang artinya pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk hal itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang diikuti dengan pemerataan pembangunan dikarenakan pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik dalam guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan, Sukirno (2010).

Menjawab hal itu negara dalam hal ini pemerintah pusat mulai mengatur program untuk merancang pembangunan ekonomi Indonesia. Namun demikian, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru ekonomi global, yaitu kawasan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi dengan mempercepat pembangunan ekonominya dan menciptakan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Di satu sisi, kegiatan percepatan pembangunan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, jika sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik dan mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan, maka akan berdampak pada timbulnya resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunnya daya dukung lingkungan hidup karenanya maka perlu persiapan yang cukup matang dari seluruh *stakeholder*.

Program pembangunan ekonomi terus dilakukan oleh pemerintah pusat dari masa ke masa, salah satu programnya yaitu pembangunan dalam bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pertama dimulai sejak era Presiden Soekarno yang dikenal dengan program politik mercusuar atau disebut juga proyek pembangunan infrastruktur nasional yang bertaraf internasional. Adapun tujuan pembangunan tersebut dijalankan adalah untuk mendapatkan perhatian dari negara lain bahwa Indonesia bisa maju dan mampu serta memiliki identitas sebagai suatu negara yang baru merdeka.

Sebut saja pembangunan Gedung MPR/DPR dan Stadion Utama Gelora

Bung Karno yang menjadi stadion sepakbola terbesar di Asia Tenggara bahkan salah satu terbesar di dunia saat itu. Kemudian sejumlah tempat olahraga lainnya di kawasan yang sama di Senayan, seperti stadion renang, tenis, Istana Olahraga (Istora), dan gedung bola basket. Di luar itu, Presiden Soekarno juga membangun infrastruktur fisik lainnya seperti Jalan M.H Thamrin, Jembatan Ampera, Jembatan Semanggi, Bendungan Jatiluhur, Bandara Juanda di Sedati, Sidoarjo, dan pembangunan jaringan telekomunikasi dengan membangun Radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta.

Kemudian pembangunan infrastruktur dilanjutkan pada periode Presiden Soeharto yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Rapelita) dengan program Rapelita I–VI dalam kurun waktu tahun 1968–1997 (sebelum krisis ekonomi) yang meliputi bidang pengairan, transportasi, dan listrik.

Selama pelaksanaan Rapelita pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan cukup pesat. Pembangunan pengairan berhasil mendorong peningkatan produksi pangan hingga mencapai swasembada dan diikuti juga dengan pembangunan transportasi yang berhasil meningkatkan akses ke berbagai daerah, terutama daerah terisolir hingga dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Distribusi barang juga dapat berjalan dengan lebih baik serta sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, pembangunan akses air bersih dan penyehatan lingkungan juga terus dilakukan. Namun demikian pembangunannya belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sehingga cakupan pelayanannya belum begitu maksimal.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur mengalami hambatan sejak

terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian nasional pasca krisis ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar dapat dilakukan lagi meskipun belum dapat secepat sebelum krisis melanda. Pembangunan infrastruktur kembali dilaksanakan dengan agenda yang jauh lebih besar pada periode Presiden berikutnya.

Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono program pembangunan infrastruktur kembali dilaksanakan yaitu dengan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025 dan merupakan salah satu paket program yang bertujuan untuk memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam jangka panjang. Program ini dilakukan salah satunya karena bentuk keseriusan dan bentuk keyakinan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pembangunan infrastruktur.

Pada perkembangan paket program RPJPN juga terbagi dalam beberapa tahapan, ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) per lima tahun yang pada saat ini dijabarkan dengan Rencana Kerja Pemerintah, dan ada yang di sifatnya daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pada Pemerintahan Joko Widodo, arah dari pembangunan infrastruktur di Indonesia kian pesat.

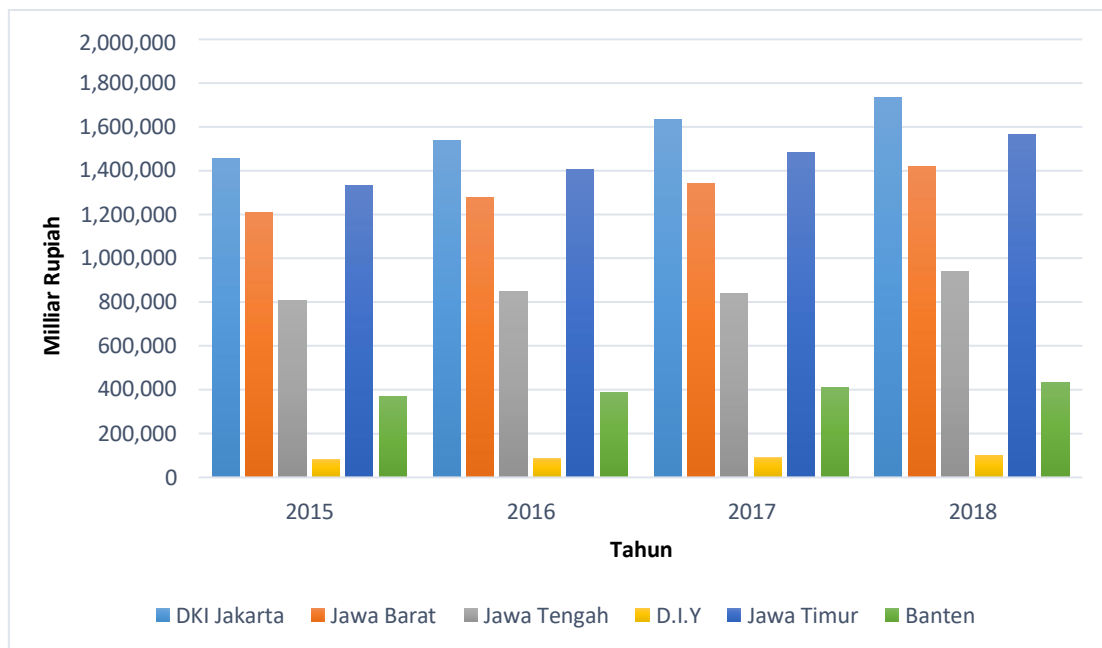
Sebut saja program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (MP3EI) yang tertuang dalam Perpres No. 14 Tahun 2014 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang secara garis besar mengikat strategi utamanya menjadi tiga hal, yaitu pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional dan penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Pada tahap ini tantangan lain dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung proses ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang menjadi perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penguatan konektivitas nasional tentunya dijabarkan dengan proses pembangunan infrastruktur segala lini baik darat, laut, dan udara serta harus dirancang untuk membuat arus investasi asing dapat masuk ke Indonesia sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur tadi.

Berdasarkan sejarah perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia, infrastruktur ditempatkan sebagai sektor *vital* dalam proses mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mencapai proses itu dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur selalu meningkat setiap tahunnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah

tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambah nya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

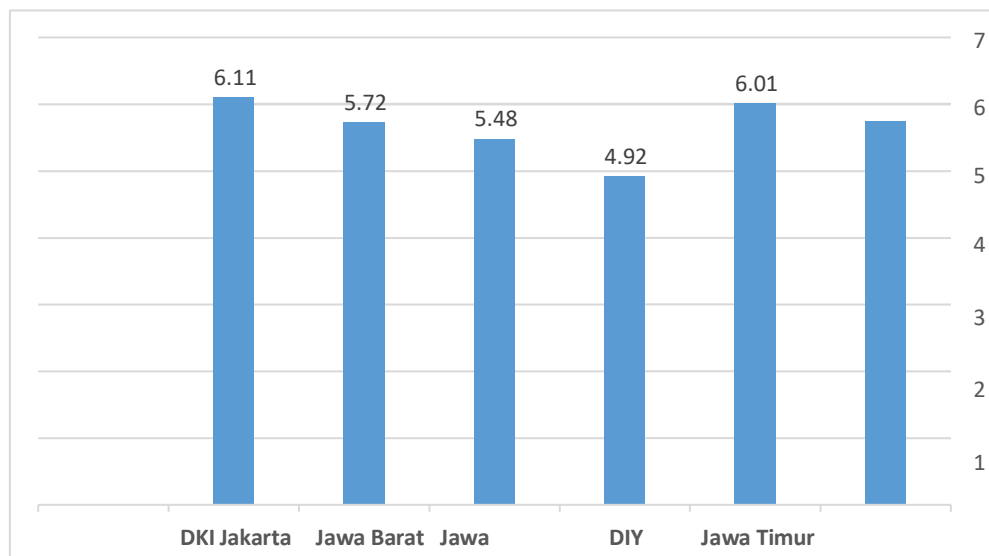
Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran yang nyata dari dampak suatu pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercermin dalam pembangunan ekonomi tiap provinsi yang menjadi indikator utama kegiatan ekonomi di Indonesia. Laju pertumbuhan suatu daerah dapat ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi (Milliar Rupiah) Tahun 2015–2018.



Sumber: BPS Indonesia dalam angka.

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi (Miliar Rupiah) Tahun 2015–2018

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa PDRB tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar Rp 1.736.291.000. Diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.419.689.000 ditahun 2018. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 941.164.000 pada tahun 2018. Kemudian diikuti oleh Provinsi Banten sebesar Rp 434.015.000 ditahun 2018. Adapun PDRB terendah pada tahun 2015 diduduki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar Rp 98.024.000 Dengan adanya data tersebut disimpulkan bahwa PDRB tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yang secara garis besar ditunjukkan pada daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan (DKI Jakarta) menunjukkan PDRB yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 6 yang berada di Pulau Jawa. Berikut adalah data rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Kostan 6 Provinsi di Pulau Jawa (Persen) Tahun 2006–2017.



Sumber: BPS (Data diolah)

Gambar 1.2 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi di Pulau Jawa (Persen) pada Tahun 2006–2017

Pada Gambar 1.2 merupakan data rata-rata laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2006–2017. Dari data yang tersaji tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan rata-rata laju pertumbuhan PDRB provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa mengalami tren yang positif. Provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi di Pulau Jawa selama 10 tahun terakhir adalah DKI Jakarta yaitu sebesar 6,11%. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan bisnis dan juga sebagai pusat pemerintahan sehingga menjadi konsentrasi kegiatan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Setelah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah kedua yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang tinggi yaitu sebesar 6,01%, kemudian disusul Provinsi Banten sebesar 5,75%, selanjutnya Provinsi Jawa Barat sebesar 5,72%, diikuti Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,48%, dan terakhir Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar

4,92%. PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan bruto yang berada dalam suatu daerah. PDRB berpengaruh pada perekonomian dengan cara redistribusi pendapatan bruto dan kekayaan serta menambah tingkat *output*. PDRB yang menurun akan menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan di suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan di suatu daerah akan menurun jika PDRB mengalami penurunan. Bukan hanya itu kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah dan juga akan bertambahnya tingkat kemiskinan.

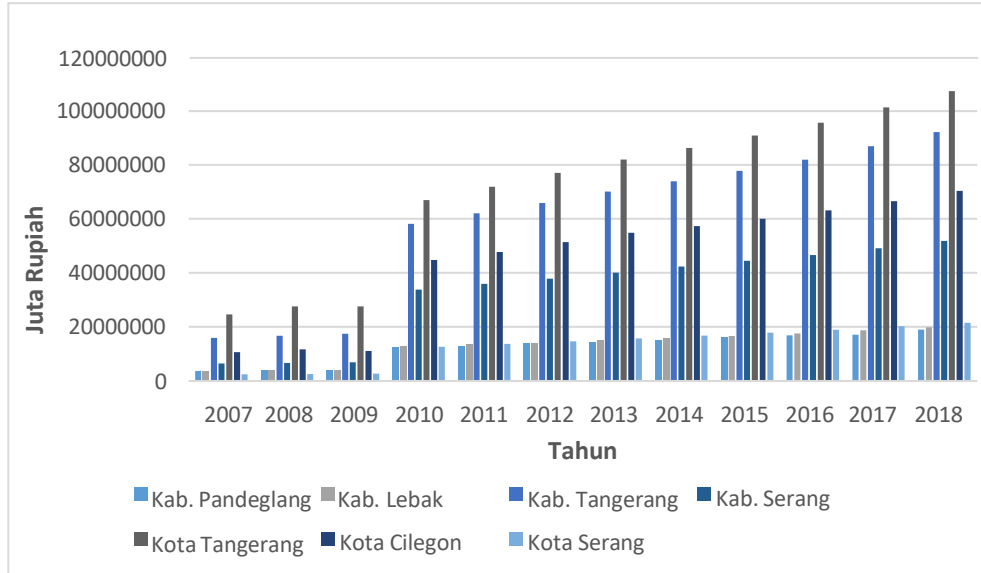
Penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan, namun penelitian ini tetap penting dilakukan karena pertumbuhan ekonomi (PDRB) perlu diperhatikan mengingat dampaknya yang sangat luas bagi perekonomian suatu daerah. Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. (Sukirno,1981).

Pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 sebelumnya, terdapat salah satu provinsi yang digolongkan sebagai provinsi baru yang mampu bersaing atau memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan provinsi yang terletak paling barat Pulau Jawa berbatasan dengan Ibukota Negara DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat membuat Provinsi Banten

menjadi daerah paling strategis. Maka dari itu penulis ingin meneliti pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan.

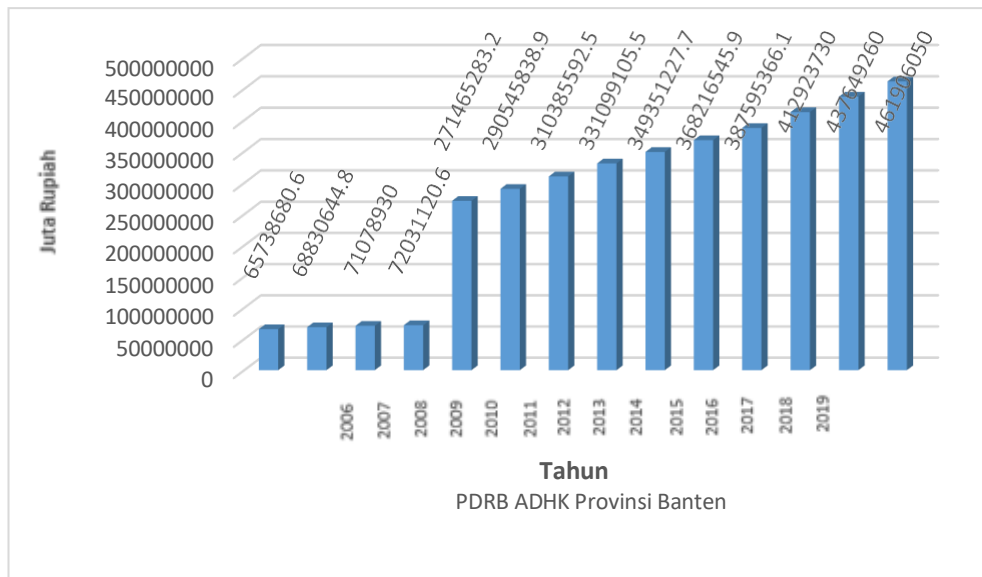
Berdasarkan hasil pemekaran tahun 2000, saat ini Provinsi Banten memiliki 8 daerah administrasi yaitu terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota. Dimana Kota Serang dipilih sebagai ibukota provinsi. Keempat kabupaten tersebut adalah Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak, sedangkan keempat kota yaitu Tangerang Kota, Serang, Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Berbagai macam karakteristik budaya dan situasi sosial yang dimiliki Provinsi Banten tumbuh dan berkembang pada 8 Kabupaten/Kota. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa prospek ekonomi Provinsi Banten 2018 semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran di atas 5%. Untuk mencapainya, beliau menambahkan butuh strategi yakni mendorong konsumsi agar tetap kuat dengan menjaga tingkat inflasi yang stabil, rendah serta mempertahankan penyaluran bansos yang tepat sasaran. Kemudian, mendorong akselerasi proyek infrastruktur dan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor produktif. Mempercepat pembenahan regulasi perizinan dengan optimalisasi OSS dan peningkatan daya saing dalam upaya menarik investasi ke Provinsi Banten. Dimana OSS ini merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian atau lembaga pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah di Indonesia. Adapun Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan perkembangan PDRB

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.



Sumber : BPS Banten dalam angka

Gambar 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2006-2018



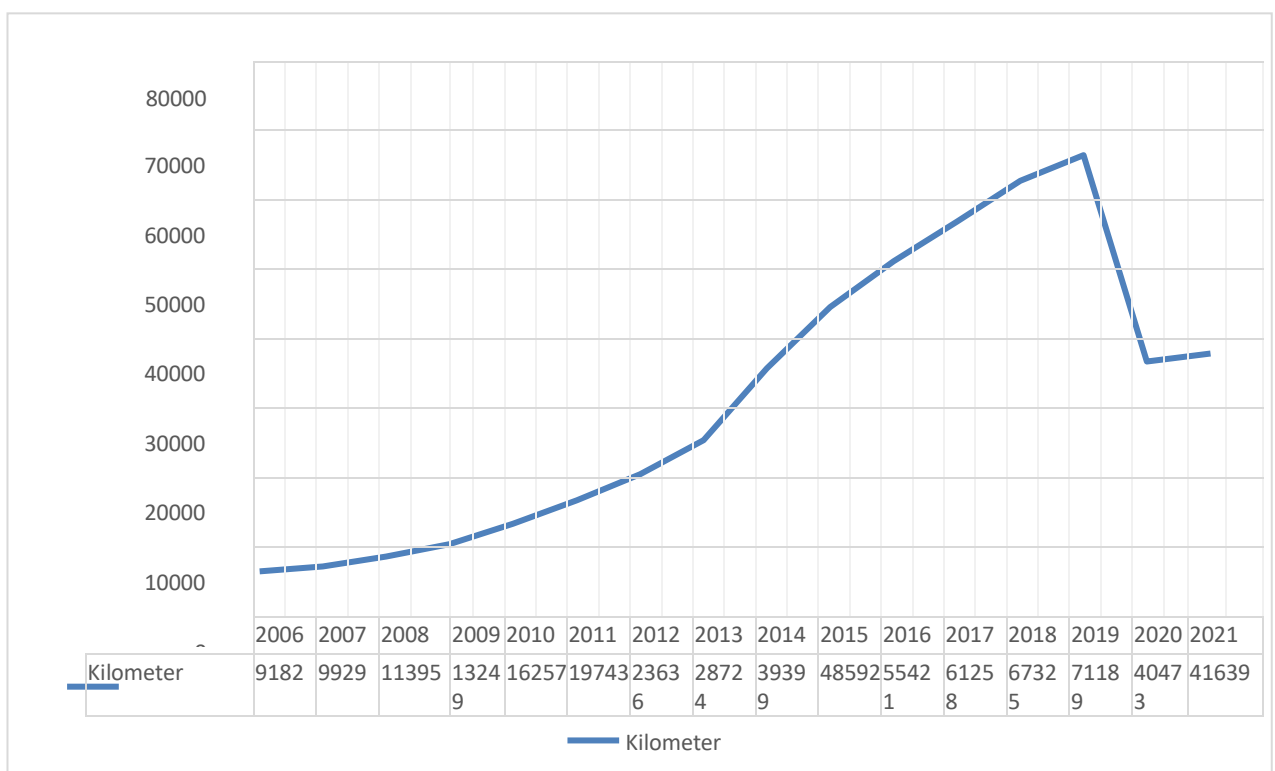
Sumber : Banten dalam angka.

Gambar 1.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Banten tahun 2006-2019

Berdasarkan gambar yang disajikan di atas, menunjukkan bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2006-2018 mengalami pertumbuhan yang positif selama kurun waktu 8 tahun dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai Rp. 278.486.955 pertahunnya. Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Provinsi Banten, Kota Tangerang memiliki kontribusi tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dikota dan kabupaten yang berada di Provinsi Banten didukung oleh sektor industri dan perdagangan serta jasa yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian kota-kota di Provinsi Banten. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk terhadap fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusmudi dan Dita (2018) bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan, pemerintah perlu lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi regional agar dapat mendorong pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menandakan adanya implikasi tentang pembangunan infrastruktur yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Adapun dalam penelitian Maskur (2018) yang meneliti Kota Kendari sebagai subjek penelitian mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembangunan infrastruktur terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari. Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan infrastruktur dalam perekonomian sangat penting sebagai pendorong peningkatan produktivitas output dan mobilitas untuk melakukan kegiatan ekonomi serta distribusi hasil pertumbuhan yang berhubungan dengan infrastruktur, berikut adalah beberapa pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:



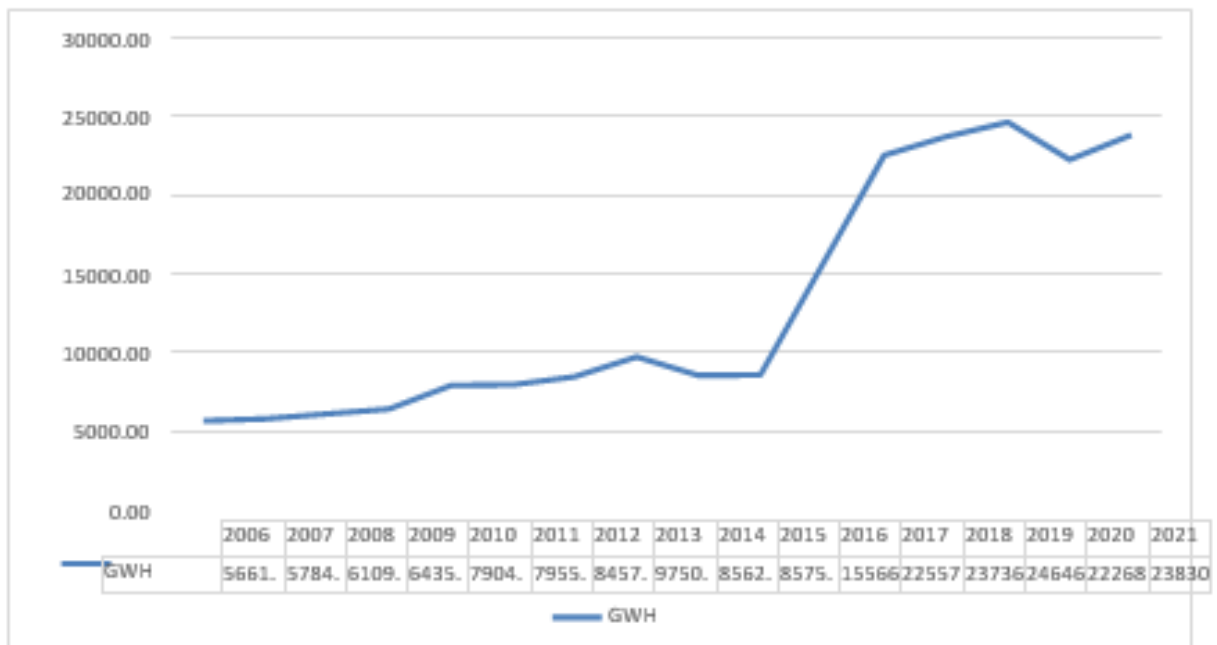
Sumber : Badan Pusat Statistik data diolah.

Gambar 1.5 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, Sedang, Rusak, Sangat Rusak Di Bawah Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten 2006-2021

Berdasarkan Gambar 1.5 di atas, dapat terlihat bahwa jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, Sedang, Rusak, Sangat Rusak Di Bawah Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2006-2021 kondisi jalan mengalami kondisi yang fluktuatif dengan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 34.838

Km per tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3.863 km dibanding tahun sebelumnya dikarenakan masalah penanganan pandemi Covid yang melanda dan seluruh anggaran difokuskan atau dialokasikan ke bidang kesehatan. Selain infrastruktur jalan sebagai infrastruktur penghubung mobilitas ekonomi dan penunjang kehidupan masyarakat ada juga infrastruktur ekonomi yang tidak kalah penting yaitu infrastruktur listrik.

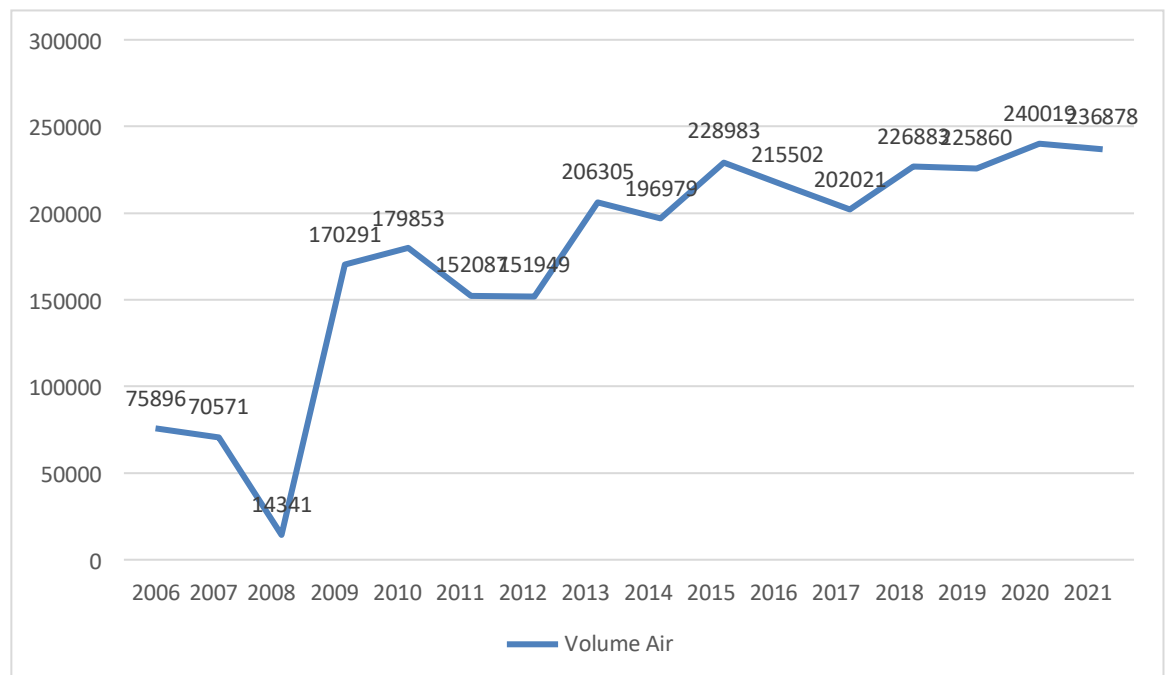
Dimana infrastruktur listrik adalah merupakan faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi karena di kota besar maupun di pedesaan listrik merupakan kebutuhan primer yang digunakan untuk berbagai kegiatan terutama kegiatan perekonomian. Berikut adalah data Jumlah Energi Listrik yang Didistribukan Menurut Provinsi dalam satuan Giga Watt Hour (GWH) pada Tahun 2006-2021 :



Sumber : Statistik Listrik

Gambar 1.6 Jumlah Energi Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi dalam satuan Giga Watt Hour (GWH) pada Tahun 2006-2021

Pada Gambar 1.6 di atas merupakan jumlah tenaga listrik yang didistribusikan di Provinsi Banten pada tahun 2006-2021 dalam satuan Giga Watt Hour (GWH), jumlah tenaga listrik yang didistribusikan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata 12.987 GWH per tahunnya. Namun, peningkatan pada Provinsi Banten tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu mengalami kenaikan sebesar 15.566 GWH yang pada tahun sebelumnya hanya sebesar 8.575 GWH pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 6.991 GWH pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 PT. Perusahaan Listrik Negara mengoperasikan Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) 500 kV Suralaya- Balaraja yang berfungsi menyalurkan daya dari pusat-pusat pembangkit listrik di Suralaya menuju pusat beban di Jakarta dan kawasan industri-industri di Provinsi Banten. Selain infrastruktur jalan dan listrik, penyediaan terhadap infrastruktur air juga tidak kalah penting sebagai infrastruktur dasar penunjang kehidupan bermasyarakat. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini pun memengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Berikut adalah data Volume Air Bersih Yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih Provinsi Banten Tahun 2006-2021:



Sumber : Statistik Air Bersih data diolah.

Gambar 1.7 Volume Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih Provinsi Banten Tahun 2006-2021

Berdasarkan gambar di atas volume air bersih yang didistribusikan di Provinsi Banten mengalami peningkatan hampir pada setiap tahunnya dengan rata-rata 174.651 m^3 yang mampu didistribusikan oleh perusahaan air bersih di Provinsi Banten dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yang meningkat sebesar 155.977 m^3 . Namun terjadi penurunan pada tahun 2008 yang mencatatkan angka sebesar 56.230 m^3 dikarenakan perpindahan kewenangan PDAM Provinsi Banten yang sebelumnya dipegang pihak swasta dalam pendistribusian air bersih.. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Maka berdasarkan data dan uraian yang telah di paparkan di atas peneliti ingin melakukan

penelitian dengan judul “**Pengaruh *Public Services* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Periode Tahun 2006-2021**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan, listrik, dan air secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2006-2021?
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan, listrik, dan air secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2006-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah didefinisikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik, dan air secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2006-2021?
2. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik, dan air secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2006-2021?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan yang diharapkan antara lain:

- 1) Bagi Penulis

Mendapat wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai hal-hal

yang berhubungan dengan infrastruktur di Provinsi Banten.

2) Bagi Universitas

Diharapkan menjadi tambahan informasi bagi pihak universitas khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

3) Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan untuk menjadi bahan masukan pemerintah agar lebih baik lagi dalam mengambil kebijakan khususnya dalam perkembangan infrastruktur.

4) Bagi pihak lainnya

Dari penelitian ini di harapkan dapat berguna dan dijadikan acuan untuk perbandingan bagi penelitian yang akan datang mengenai dinamika yang terjadi dalam perkembangan infrastruktur.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, World Bank, dan Bappeda Provinsi Banten.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2022-2023, dengan perkiraan antara bulan Februari 2022 sampai dengan Februari 2023.

